

Tambang Batu Bara Ilegal Marak

Aktivitas tambang batu bara tanpa ijin di wilayah Kalimantan Selatan, kembali marak. Saat ini mulai merambah kawasan hutan serta lahan konsesi milik sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri.

"Ketegasan aparat penegak hukum diperlukan untuk memberantas aktivitas penambangan batu bara ilegal ini," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel, M Ikhlas, Selasa (24/7) di Banjarmasin.

Data yang diterima BLHD provinsi Kalimantan Selatan, areal konsesi perusahaan tambang batu bara PT Arutmin Indonesia, serta PT Jorong Barutama Grestone menjadi sasaran empuk aktifitas tambang batubara ilegal. Kedua perusahaan tambang ini lokasinya tidak jauh dari pesisir laut, sehingga memudahkan dalam aktivitas bongkar muat.

Hal ini berbeda dengan kuasa pertambangan PT Adaro Indonesia yang harus menempuh ratusan kilometer untuk bisa ketempat pelabuhan bongkar muat seperti di Tabonio. Dengan demikian areal PT Adaro Indonesia lebih aman dari sentuhan para penambang batu bara tanpa izin.

Selain lahan kuasa pertambangan, areal perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Hutan Rindang Banea (dulu PT MHB) turut menjadi sasaran penambang tanpa izin. Pada areal PT Arutmin Indonesia tercatat ada 64 titik aktivitas penambangan batu bara tanpa ijin, kemudian ditambah aktivitas tanpa izin di areal PT JBG dan PT HRB. "Sebagian penambang illegal tersebut, beraktivitas terang-terangan," kata Ikhlas.

Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan meminta, pemerintah pusat, segera menindak sejumlah pelabuhan khusus (Pelsus) yang dinilai nakal, karena diduga berani menampung batu bara hasil penambangan tanpa izin.

Rudy mengungkapkan Pemprov Kalsel telah melaporkan delapan pelsus ke Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kedelapan pelsus ini, beroperasi diduga dengan menerima batu bara yang diangkut menggunakan jalan negara dan batu bara dari perusahaan pertambangan tanpa izin.

Pelsus tersebut, lanjut Wagub, dinilai telah melanggar Perda 3/2012 tentang pengaturan angkutan hasil tambang dan perkebunan. Selama ini pengawasan terhadap Pelsus yang beroperasi sulit dilakukan, karena mereka main mata dengan petugas.